



SALINAN

**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 131.33-273 TAHUN 2021

TENTANG

PENGESAHAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH MASA JABATAN TAHUN 2016-2021 DI KABUPATEN DAN KOTA PADA
PROVINSI JAWA TENGAH

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan karena berakhir masa jabatannya;
 - b. bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2016-2021, yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri ini akan berakhir masa jabatannya pada tahun 2021, maka perlu mengesahkan pemberhentiannya kepada masing-masing yang bersangkutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Masa Jabatan Tahun 2016-2021 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3160), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);
5. Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu;

Memperhatikan

1. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 131/0127 tanggal 15 Januari 2021 Perihal Usulan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Purworejo;
2. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 131/001878 tanggal 2 Februari 2021 Hal Permohonan Pengesahan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Purworejo;
3. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Nomor 171.2/008/2021 tanggal 22 Januari 2021 Perihal Usulan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dan Usulan Pemberhentian Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2016-2021;
4. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 131/0001869 tanggal 2 Februari 2021 Hal Permohonan Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Terpilih Tahun 2020;
5. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 171.5/095/I/2021 tanggal 22 Januari 2021 Perihal Usul Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan Usul Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Periode sebelumnya;
6. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 131/0001874 tanggal 2 Februari 2021 Hal Permohonan Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Terpilih Tahun 2020;

7. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 170/50 tanggal 25 Januari 2021 Perihal Usul Pengesahan Pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota Semarang Masa Jabatan Tahun 2016-2021 dan Usul Pengesahan Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020;
8. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 131/001866 tanggal 2 Februari 2021 Hal Permohonan Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Terpilih Tahun 2020;
9. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 131/64/140 tanggal 25 Januari 2021 Perihal Usul Pengesahan Pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota Kota Magelang Masa Jabatan 2016-2021 dan Usul Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2020;
10. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 131/0001867 tanggal 2 Februari 2021 Hal Permohonan Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Terpilih Tahun 2020;
11. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 131/0080/I/2021 tanggal 25 Januari 2021 Perihal Usul Pengesahan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Masa Jabatan 2016-2021 dan Usul Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Terpilih Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;
12. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 131/0001868 tanggal 2 Februari 2021 Hal Permohonan Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Terpilih Tahun 2020;
13. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bora Nomor 170/0100/2021 tanggal 25 Januari 2021 Hal Usulan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Bora Masa Jabatan 2016-2021;
14. Surat Gubernur Jawa Tengah 131/0001871 tanggal 2 Februari 2021 Hal Permohonan Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Bora Terpilih Tahun 2020;
15. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 172.1/143/DPRD tanggal 25 Januari 2021 Perihal Usul Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih;
16. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 131/0001872 tanggal 2 Februari 2021 Hal Permohonan Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Terpilih Tahun 2020;
17. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170/104 tanggal 25 Januari 2021 Perihal Usul Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Terpilih Tahun 2020;
18. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 131/0001873 tanggal 2 Februari 2021 Hal Permohonan Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Terpilih Tahun 2020;

19. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 172/032/Setwan tanggal 25 Januari 2021 Perihal Usul Pemberhentian dan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo;
20. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 131/0001875 tanggal 2 Februari 2021 Hal Permohonan Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Terpilih Tahun 2020;
21. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 131/51 tanggal 25 Januari 2021 Perihal Usulan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta Usulan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Masa Jabatan Tahun 2016-2021;
22. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 131/0001870 tanggal 2 Februari 2021 Hal Permohonan Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Demak Terpilih Tahun 2020;
23. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 170/353/1/2021 tanggal 25 Januari 2021 Hal Usul Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon terpilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 dan Usulan Pemberhentian Bupati Grobogan Masa Jabatan Tahun 2016-2021;
24. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 131/0001876 tanggal 2 Februari 2021 Hal Permohonan Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Terpilih Tahun 2020;
25. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Nomor 172/356/10 tanggal 26 Januari 2021 Perihal Usulan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Masa Jabatan 2021-2024 dan Mengusulkan Pemberhentian Bupati Klaten Masa Jabatan Tahun 2016-2021;
26. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 131/0001877 tanggal 2 Februari 2021 Hal Permohonan Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Terpilih Tahun 2020;
27. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 170/52/2021 tanggal 26 Januari 2021 Perihal Usulan Peresmian Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Periode Tahun 2016-2021;
28. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 131/0001879 tanggal 2 Februari 2021 Hal Permohonan Pengesahan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Masa Jabatan 2016-2021;
29. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 131/05/2021 tanggal 26 Januari 2021 Perihal Usul Pengesahan Pemberhentian Bupati Purbalingga Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021 dan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020;
30. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 131/0001881 tanggal 2 Februari 2021 Hal Permohonan Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Terpilih Tahun 2020;
31. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 170/0082 tanggal 26 Januari 2021 Perihal Usulan Pengesahan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Semarang;

32. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 131/0001882 tanggal 2 Februari 2021 Hal Permohonan Pengesahan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Semarang Masa Jabatan 2016-2021;
33. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 171.2/376/I/2021 tanggal 26 Januari 2021 Perihal Usulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, dan Pemberhentian Pengangkatan Walikota Dan Wakil Walikota Surakarta Periode Masa Jabatan 2016-2021;
34. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 131/0001886 tanggal 2 Februari 2021 Hal Permohonan Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Terpilih Tahun 2020;
35. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Nomor 131/0093 tanggal 27 Januari 2021 Perihal Usulan Pengesahan Pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Periode 2016-2021 dan Usulan Pengesahan Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Hasil Pemilihan Tahun 2020;
36. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 131/0001885 tanggal 2 Februari 2021 Hal Permohonan Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Terpilih Tahun 2020;
37. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 170/031 tanggal 27 Januari 2021 Perihal Usulan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Masa Jabatan Tahun 2016-2021;
38. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 131/0001887 tanggal 2 Februari 2021 Hal Permohonan Pengesahan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Masa Jabatan 2016-2021;
39. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Nomor 170/10/DPRD/2021 tanggal 27 Januari 2021 Perihal Usulan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta usulan Pemberhentian Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Periode sebelumnya;
40. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 131/0001884 tanggal 2 Februari 2021 Hal Permohonan Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Terpilih Tahun 2020;
41. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 170/0083/2021 tanggal 1 Februari 2021 Perihal Usul Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Rembang;
42. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 131/0002274 tanggal 5 Februari 2021 Hal Permohonan Pengesahan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Rembang;
43. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 131/51 tanggal 25 Januari 2021 Perihal Usulan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta usulan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Masa Jabatan Tahun 2016-2021;
44. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 131/0001870 tanggal 2 Februari 2021 Hal Permohonan Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Demak Terpilih Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGESAHAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH MASA JABATAN TAHUN 2016-2021 DI KABUPATEN DAN KOTA PADA PROVINSI JAWA TENGAH.
- KESATU : Mengesahkan pemberhentian dengan hormat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri ini sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2016-2021, terhitung sejak berakhirnya masa jabatan dan kepadanya diberikan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan:
- a. untuk Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota:
 1. Kabupaten Semarang;
 2. Kabupaten Kebumen;
 3. Kabupaten Rembang;
 4. Kabupaten Purbalingga;
 5. Kabupaten Boyolali;
 6. Kabupaten Blora;
 7. Kabupaten Kendal;
 8. Kabupaten Sukoharjo;
 9. Kabupaten Wonosobo;
 10. Kabupaten Wonogiri;
 11. Kabupaten Purworejo;
 12. Kabupaten Klaten;
 13. Kabupaten Pemalang;
 14. Kota Pekalongan;
 15. Kota Semarang;
 16. Kota Surakarta; dan
 17. Kota Magelang,berakhir masa jabatan pada tanggal 17 Februari 2021;
 - b. untuk Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota:
 1. Kabupaten Grobogan berakhir masa jabatan pada tanggal 21 Maret 2021;
 2. Kabupaten Sragen berakhir masa jabatan pada tanggal 4 Mei 2021;
 3. Kabupaten Demak berakhir masa jabatan pada tanggal 4 Mei 2021; dan
 4. Kabupaten Pekalongan berakhir masa jabatan pada tanggal 27 Juni 2021, atauKepada masing-masing Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 (satu) sampai dengan angka 4 (empat) di atas berakhir masa jabatannya pada saat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 dilantik, mengucapkan sumpah dan janji; dan

- c. apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada Keputusan Menteri ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2021
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

SALINAN

- : Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:
1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
 4. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 di Jakarta;
 5. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
 6. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta;
 7. Sekretaris Jenderal Kemendagri di Jakarta;
 8. Inspektur Jenderal Kemendagri di Jakarta;
 9. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri di Jakarta;
 10. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri di Jakarta;
 11. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri di Jakarta;
 12. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri di Jakarta;
 13. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 14. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota Masa Jabatan Tahun 2016-2021 di Provinsi Jawa Tengah;
 15. Ketua DPRD Kabupaten Boyolali di Boyolali;
 16. Ketua DPRD Kabupaten Kendal di Kendal;
 17. Ketua DPRD Kabupaten Blora di Blora;
 18. Ketua DPRD Kabupaten Pemalang di Pemalang;
 19. Ketua DPRD Kabupaten Kebumen di Kebumen;
 20. Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo di Wonosobo;
 21. Ketua DPRD Kabupaten Klaten di Klaten;
 22. Ketua DPRD Kabupaten Purworejo di Purworejo;
 23. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 24. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga di Purbalingga;
 25. Ketua DPRD Kabupaten Semarang di Semarang;
 26. Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri di Wonogiri;
 27. Ketua DPRD Kabupaten Rembang di Rembang;
 28. Ketua DPRD Kabupaten Sragen di Sragen;
 29. Ketua DPRD Kabupaten Demak di Demak;
 30. Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan di Kajen;
 31. Ketua DPRD Kabupaten Grobogan di Purwodadi;
 32. Ketua DPRD Kota Semarang di Semarang;
 33. Ketua DPRD Kota Magelang di Magelang;
 34. Ketua DPRD Kota Pekalongan di Pekalongan;
 35. Ketua DPRD Surakarta di Surakarta;
 36. Ketua KPU Kabupaten Boyolali di Boyolali;
 37. Ketua KPU Kabupaten Kendal di Kendal;
 38. Ketua KPU Kabupaten Blora di Blora;
 39. Ketua KPU Kabupaten Pemalang di Pemalang;
 40. Ketua KPU Kabupaten Kebumen di Kebumen;

41. Ketua KPU Kabupaten Wonosobo di Wonosobo;
42. Ketua KPU Kabupaten Klaten di Klaten;
43. Ketua KPU Kabupaten Purworejo di Purworejo;
44. Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
45. Ketua KPU Kabupaten Purbalingga di Purbalingga;
46. Ketua KPU Kabupaten Semarang di Semarang;
47. Ketua KPU Kabupaten Wonogiri di Wonogiri;
48. Ketua KPU Kabupaten Rembang di Rembang;
49. Ketua KPU Kabupaten Demak di Demak;
50. Ketua KPU Kabupaten Pekalongan di Kajen;
51. Ketua KPU Kabupaten Grobogan di Purwodadi;
52. Ketua KPU Kabupaten Sragen di Sragen;
53. Ketua KPU Kota Semarang di Semarang;
54. Ketua KPU Kota Magelang di Magelang;
55. Ketua KPU Kota Pekalongan di Pekalongan;
56. Ketua KPU Kota Surakarta di Surakarta; dan
57. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Semarang.

PETIKAN : Keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum



H. Heru Nihyomo
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630501199103 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 131.33-273 TAHUN 2021
TENTANG
PENGESAHAN PEMBERHENTIAN KEPALA
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH MASA
JABATAN TAHUN 2016-2021 DI KABUPATEN
DAN KOTA PADA PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH MASA JABATAN TAHUN 2016-2021
DI KABUPATEN DAN KOTA PADA PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	NAMA	JABATAN	KABUPATEN/ KOTA
1.	Drs. SENO SAMODRO	BUPATI	KABUPATEN BOYOLALI
	MOHAMMAD SAID HIDAYAT, SH	WAKIL BUPATI	
2.	Dr. MIRNA ANNISA, M.Si	BUPATI	KABUPATEN KENDAL
	MASRUR MASYKUR	WAKIL BUPATI	
3.	H. DJOKO NUGROHO	BUPATI	KABUPATEN BLORA
	H. ARIEF ROHMAN, M.Si	WAKIL BUPATI	
4.	H. JUNAEDI, SH, MM	BUPATI	KABUPATEN PEMALANG
	Drs. H. MARTONO	WAKIL BUPATI	
5.	KH. YAZID MAHFUDZ	BUPATI	KABUPATEN KEBUMEN
	H. ARIF SUGIYANTO, SH	WAKIL BUPATI	
6.	EKO PURNOMO, SE, MM	BUPATI	KABUPATEN WONOSOBO
	Ir.H. AGUS SUBAGIYO, M.Si	WAKIL BUPATI	
7.	AGUS BASTIAN, SE, MM	BUPATI	KABUPATEN PURWOREJO
	YULI HASTUTI, SH	WAKIL BUPATI	
8.	H. WARDOYO WIJAYA, SH, MH	BUPATI	KABUPATEN SUKOHARJO
	PURWADI, SE, MM	WAKIL BUPATI	
9.	Hj. SRI MULYANI	BUPATI	KABUPATEN KLATEN
10.	DYAH HAYUNING PRATIWI	BUPATI	KABUPATEN PURBALINGGA
11.	SRI SUMARNI, SH, MM	BUPATI	KABUPATEN GROBOGAN
12.	dr. H. MUNDJIRIN ES, Sp.OG	BUPATI	KABUPATEN SEMARANG
	NGESTI NUGRAHA, SH	WAKIL BUPATI	
13.	JOKO SUTOPO	BUPATI	KABUPATEN WONOGIRI
	EDY SANTOSA, SH	WAKIL BUPATI	
14.	H. ABDUL HAFIDZ	BUPATI	KABUPATEN REMBANG
	BAYU ADRIYANTO, SE	WAKIL BUPATI	

NO.	NAMA	JABATAN	KABUPATEN/ KOTA
15.	dr. KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI	BUPATI	KABUPATEN SRAGEN
	DEDY ENDRIYATNO	WAKIL BUPATI	
16.	HM. NATSIR	BUPATI	KABUPATEN DEMAK
	Drs. JOKO SUTANTO	WAKIL BUPATI	
17.	H. ASIP KHOLBIHI, SH, M.Si	BUPATI	KABUPATEN PEKALONGAN
	Ir. Hj. ARINI HARIMURTI	WAKIL BUPATI	
18.	H. HENDRAR PRIHADI alias HENDI, SE, MM	WALI KOTA	KOTA SEMARANG
	Ir. Hj. HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU	WAKIL WALI KOTA	
19.	Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT	WALI KOTA	KOTA MAGELANG
	Dra. WINDARTI AGUSTINA	WAKIL WALI KOTA	
20.	H.M. SAELANY MACHFUDZ	WALI KOTA	KOTA PEKALONGAN
	H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, SE	WAKIL WALI KOTA	
21.	FX. HADI RUDYATMO	WALI KOTA	KOTA SURAKARTA
	Dr. H. ACHMAD PURNOMO, Apt	WAKIL WALI KOTA	

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum


H. Heru Tjahyono
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630501 199103 1 003